

STRATEGI PEMERATAAN DALAM KESESUAIAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN DADAPREJO KOTA BATU

Ferdyla Frisca Prasetyaningtyas¹, Yaqub Cikusin², Hirshi Anadza³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

Email: ferdylafrisca24200@gmail.com

ABSTRAK

Strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo ini bertujuan untuk memberikan informasi agar masyarakat melaksanakan kebijakan dan peraturan dalam mempermudah proses penyesuaian penerima bantuan. Kesesuaian penerima Bantuan Langsung Tunai pada Kelurahan Dadaprejo memiliki tingkat kesesuaian sangat tinggi dibandingkan Desa yang lain di Kecamatan Junrejo. Untuk mempercepat dan menyelesaikan masalahnya maka Kelurahan Dadaprejo memberikan suatu strategi agar dapat mengatasi masalah yang ada di daerahnya dengan baik pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan lembaga daerah yang ada dengan baik sehingga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri terutama masalah kemiskinan dan pemberian bantuan. Kesesuaian penerima Bantuan Langsung Tunai pada Kelurahan Dadaprejo memiliki tingkat kesesuaian sangat tinggi dibandingkan Desa yang lain di Kecamatan Junrejo. Hal yang mempengaruhi tingkat kesesuaian yang tinggi pada Kelurahan Dadaprejo. Hal tersebut perlu kita cari tau strategi apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo untuk mencapai tingkat kesesuaian penerima bantuan yang tinggi atau tingkat ketidaksesuaian yang rendah. Hal yang mempengaruhi tingkat kesesuaian yang tinggi pada Kelurahan Dadaprejo. Hal tersebut perlu kita cari tau strategi apa saja yang dilakukan oleh Kelurahan Dadaprejo untuk mencapai tingkat kesesuaian penerima bantuan yang tinggi atau tingkat ketidaksesuaian yang rendah. Dari permasalahan tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana strategi pemerataan dan kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo. Dan untuk mengetahui faktor penghambat dari strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

Kata Kunci : Strategi, Pemerataan, Bantuan Langsung Tunai

Pendahuluan

Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sering dikaitkan dengan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan terdiri dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berbagai aspek diantaranya ekonomi, sosiologi, antropologi, teknologi, kebijakan serta perubahan global. Pada umumnya masyarakat miskin akan diberikan bantuan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wrihatnolo, 2002:10).

Bantuan umumnya bersifat sementara yang diberikan ketika adanya kondisi sosial tertentu seperti bencana, resesi ekonomi atau kebijakan pemerintah tertentu. Akan tetapi, ada beberapa bantuan yang sifatnya tetap khususnya bagi masyarakat yang memiliki kerentanan tetap seperti disabilitas, lansia, dan anak terlantar. Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan bantuan dari pemerintah yang merupakan kebijakan untuk

memberikan bantuan berupa uang tunai atau lainnya (Sasuwuk, C.H & Palar, N, 2021).

Berdasarkan pada verifikasi atau pemeriksaan kebenaran yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 penerima bantuan langsung tunai pada setiap Kecamatan terdapat 2.152 orang pada Kecamatan Batu, pada Kecamatan Bumiaji sebanyak 1.842 penerima dan pada Kecamatan Junrejo sebanyak 1.991 penerima bantuan. Berdasarkan survei dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kecamatan dimana orang tersebut sebagai penyalur atau pengecek bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mana salah satu tugasnya memberi dan mengecek bantuan.

Pada Kecamatan Batu terdapat 16% penerima bantuan yang tidak sesuai dari total penerima, pada Kecamatan Bumiaji terdapat kurang lebih 19% penerima bantuan langsung yang tidak tepat sasaran, dan sedangkan pada Kecamatan Junrejo terdapat 12% penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria miskin. Hasil data tersebut

merupakan data dari setiap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada tiap Kecamatan di Kota Batu.

Berdasarkan pada tingkat ketidaksesuaian penerima bantuan langsung tunai, Kecamatan Junrejo memiliki presentase tingkat ketidaksesuaian sangat rendah. Pada Kecamatan Junrejo terdapat satu Kelurahan, yakni Kelurahan Dadaprejo. Berdasarkan pada hasil wawancara pada Kelurahan Dadaprejo memiliki tingkat ketidaksesuaian sangat rendah yakni 4% jika dibandingkan dengan daerah lain diluar Kecamatan Junrejo. Oleh karena itu, bagaimana cara Kelurahan Dadaprejo menjadi salah satu kelurahan yang memiliki ketidaksesuaian sangat rendah. Strategi yang dilakukan di Kelurahan Dadaprejo membuktikan bahwa daerah tersebut memiliki cara yang tepat pada masalah tersebut sehingga tidak terjadi hambatan dan kesulitan dalam pemberian bantuan. peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Strategi Pemerataan Dalam Kesesuaian Penerima Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu**"

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu.

Manfaat Penulisan

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini dilaksanakan adalah:

- a. Bagi pembaca, sebagai salah satu sumber informasi tambahan dalam memperoleh suatu informasi untuk mengidentifikasi penemuan strategi dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai.
- b. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan tambahan dan memberikan pengalaman serta memberikan informasi mengenai kegiatan penelitian.
- a. Bagi aparatur daerah, mampu menjadikan acuan dalam melaksanakan kinerja aparatur daerah bisa berjalan dengan baik.

Tinjauan Pustaka

Kemiskinan

Menurut Chamsyah (2008) penyebab dari kemiskinan adalah hubungan atau permasalahan yang kompleks antara individu yang berkehidupan dengan daya yang lemah dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun dalam ruang struktur sosial (negara). Individu merupakan penyebab kemiskinan merupakan faktor utama dari sebuah kemiskinan. Penyebab kemiskinan merupakan acuan dalam menangani masalah kemiskinan. Sebuah negara bisa dikategorikan sebagai negara miskin berdasarkan pada ketentuan tiap daerah. Untuk menghindari kesalah pahaman, negara ini tidak dinamai sebagai negara miskin (poor country) negara terbelakang (underdeveloped country) melainkan menjadi negara berkembang (developing country). kemiskinan menurut Edi Suharto (2005) dilihat berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan strategi penanggulangan

Otonomi Daerah

Menurut Rondinelli (1983) otonomi daerah merupakan satu perencanaan yang sama dengan desentralisasi yang mana penyerahan perencanaan, pembuat keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, suatu administrative daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. ada empat indikator dalam desentralisasi, yaitu (1) dekonsentrasi, sebagai penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. (2) delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah, (3) devolusi, pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah.

Pada otonomi daerah Menurut Rondinelli (1983) berdasarkan devolusi, delegasi, dan dekonsentrasi. Dan pada strategi pemerataan pembanunan

Strategi Pemerataan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo dan Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat tradisional menuju modern. pada strategi pemerataan pembanunan menurut Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004) bentuk perencanaan dengan *top down planning* dan *bottom-up planning*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan analisis ini memaparkan hasil penelitian yang berkaitan berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dilanjutkan dengan interpretasi dan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan mengkategorikan data untuk mendapatkan gambaran yang sistematis terkait pelaksanaan program PTSL, kemudian melakukan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan definisi secara ilmiah guna mendapatkan gambaran secara sistematis terkait dengan strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bermanfaat sebagai batasan mengenai objek peneliti yang diambil. Manfaat lain dari fokus penelitian ini agar tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penetapan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan (Sugiyono, 2017:207). Fokus pembahasan adalah mengenai kemiskinan, otonomi daerah dan strategi pemerataan pembangunan,

Situs dan latar penelitian

Pemilihan lokasi harus memenuhi syarat-syarat, yakni: a). Sesuai dengan substansi penelitian karena lokasi bisa memberikan substansi permasalahan penelitian yang diteliti. b). Mampu menyediakan data, lokasi penelitian yang sesuai dapat memberikan data yang cukup sehingga dengan permasalahan mengenai data bisa tersusun dengan baik. c). dapat menerima peneliti untuk memperoleh data. Lokasi pada penelitian ini adalah pada Kelurahan Dadaprejo Kota Batu. Situs penelitian merupakan tempat seharusnya dimana peneliti menangkap objek dari yang diteliti yakni, perangkat desa daerah setempat pada Kelurahan Dadaprejo Kota Batu.

Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini, yakni (Sugiyono, 2018:456):

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang utama digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi terkait pada fokus penelitian. Hal yang dilakukan pada pengambilan data primer adalah melakukan wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer yang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan lain. Data ini diperoleh dengan melakukan dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini, dalam hal pengumpulan data menggunakan tiga Teknik, sebagai berikut (Salma, 2021):

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan yang dibuat secara sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo upaya untuk menyelesaikan urusan kemiskinan,

Kegiatan pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data yang akurat dan untuk mengetahui relevansi jawaban responden dan kenyataan yang ada di lapangan dalam hal strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

b. Wawancara

Teknik selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah melakukan tanya jawab secara lisan dan mendalam kepada beberapa informan yang diambil sebagai contoh baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan yang mana dianggap mampu dalam memberikan informasi yang akurat berdasarkan strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan salah satu penunjang penelitian yang relevan dengan strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan menggunakan tiga tahapan berdasarkan Miles dan Hurman dalam Aswad (2018:33) sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data pada kali ini memiliki arti sebagai merangkum, memilih dan memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting yang menjadikan inti dalam sebuah hasil. Reduksi data berarti merupakan komponen pertama dalam sebuah analisis data yang mana mempersingkat,

mempertegas, dan menghindari hal yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian sehingga pembuatan kesimpulan bisa dibuat secara jelas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)
Penyajian data merupakan bentuk penyusunan data yang merupakan uraian secara singkat. Penyajian data yang digunakan pada penelitian kualitatif bersifat naratif. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman secara mudah.
3. Verifikasi Penarikan (Conclusion Drawing)
Tahap terakhir dalam Teknik analisis data ini adalah membuat penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian mungkin bisa menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan, namun bisa juga tidak karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan.

Keabsahan Data

Keabsahan data bisa diuji meliputi beberapa hal, yakni kredibilitas data, uji dependability, dan uji confirmability. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan dengan beberapa cara. Dengan ini ada dua triangulasi dalam keabsahan data, sebagai berikut (Sari dan Saudina, 2019):

1. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber merupakan melakukan perbandingan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan membandingkan apa yang dikatakan oleh umum dan apa yang yang dipikirkan oleh pribadi. Membandingkan wawancara dan dokumen.
2. Triangulasi Teknik Triangulasi Teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini akan menggunakan Teknik observasi dan wawancara untuk mengecek data yang diperoleh dengan Teknik pengumpulan yang diambil dari informan kemudian dicek kembali berdasarkan sumber data sebelumnya.

Pembahasan

Dalam strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo Kota Batu maka peneliti

menjelaskan mengenai teori tersebut sebagai berikut:

1. Kondisi Kemiskinan

Strategi pemerataan dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo ini merupakan cara Kelurahan Dadaprejo dalam melaksanakan bantuan secara merata. Menurut Kotze (dalam Hikmat, 2004:6) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Bantuan dari pemerintah memang membantu dan digunakan tetapi bukan berarti mereka hanya menunggu bantuan dari luar saja.

Terdapat empat bentuk kemiskinan Nasikun (2001) kemiskinan absolut, relative, kultural, dan structural. Berdasarkan pada hasil penelitian Kelurahan Dadaprejo termasuk pada bentuk kemiskinan yang dijelaskan oleh Bu Dian Rahmawati bahwa kemiskinan yang ada di Kelurahan Dadaprejo adalah berdasarkan faktor usia yang mana sudah menempuh usia yang sudah tidak produktif lagi dalam bekerja. Selain itu, pendapatan yang diperoleh tetap saja sedikit walaupun sudah berusaha lebih hingga usianya sudah tidak produktif lagi. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan berdasarkan usia yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 60% dari total masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Dadaprejo sehingga kemiskinan jenis tersebut menjadi yang dominan di Kelurahan Dadaprejo. Hal tersebut membuat kondisi kemiskinan di Kelurahan Dadaprejo termasuk pada kemiskinan yang absolut. Kemiskinan absolut merupakan bila pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, rumah, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

Dengan kondisi kemiskinan yang dominan absolut membuat bantuan langsung tunai menjadi solusi terbaik bagi Kelurahan Dadaprejo karena masyarakat yang miskin dominan adalah berdasarkan usia yang sudah rentan dan memiliki pendapatan di bawah rata-rata membuat masyarakat tersebut mengandalkan bantuan sebagai tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada kondisi kemiskinan di Kelurahan Dadaprejo dominan adalah pada usia renta dan memiliki pendapatan di bawah rata-rata sehingga mereka tidak hanya mendapatkan bantuan dari pemerintah saja, melainkan adanya bantuan dari luar pemerintahan yaitu dari usaha perorangan yang sangat besar di Kelurahan Dadaprejo sehingga sering kali memberikan bantuan pada masyarakat tersebut. Hal ini dilaksanakan diluar dari tanggung jawab pemerintah karena hal tersebut dilaksanakan oleh perorangan dan Kelurahan Dadaprejo hanya memfasilitasi hal tersebut.

2. Otonomi daerah dengan dekonsentrasi

Otonomi daerah adalah sebuah mekanisme yang mana memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu (Hakim, 2005).

Menurut Suparmoko (2002) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. sebagai daerah yang otonom, wilayah kabupaten, provinsi, dan kota mempunyai kewenangan dalam hal membuat suatu kebijakan publik. Pemberian otonomi seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Adanya otonomi daerah yang mana diberikan pada daerah otonom untuk mengurus daerahnya sendiri demi kepentingan daerah tersebut membuat Kelurahan Dadaprejo membuat wewenang dalam menyelenggarakan pemerintahan, seperti yang disampikan oleh Pak Hartono selaku seksi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam data hasil wawancara yang mana adanya otonomi daerah membuat Kelurahan meminta bantuan pada lembaga daerah untuk membantu dalam proses penyelenggaraan pemberian bantuan langsung tunai. Dalam proses pendataan dibantu oleh LPMK, karang taruan dan RT/RW desa setempat untuk mempercepat waktu dan memperoleh hasil yang tepat. Setelah adanya bantuan tersebut memang sangat sedikit sekali permasalahan terutama mengenai ketepatan pemberian bantuan karena sudah tidak lagi adanya keterlambatan. Proses validasi untuk masyarakat berjalan sangat cepat sehingga tidak mengulur waktu untuk pendistribusian bantuan. Dengan membuat kewenangan dan kebijakan yang tepat membuat proses pendataan bantuan langsung tunai berjalan dengan baik sehingga penerima bantuan pun sesuai.

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, sebagai berikut: a) meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pendapatan asli daerah

lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. c) Meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta keistimewaan daerah.

3. Strategi Pemerataan *Bottom-up* Pada Kelurahan Dadaprejo

Pemerataan pembangunan sudah ada pada Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat yang berarti jika fungsi dan juga tujuan dari Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan. Menurut tjokroamidjojo (2013) pembangunan merupakan upaya kegiatan masyarakat yang merupakan sebuah perubahan sosial besar di berbagai bidang kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik, seperti dengan pandangan masyarakat itu sendiri. Pembangunan agar terjadi sebuah perubahan positif dalam semua bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Pembangunan itu sendiri memiliki tujuan akhir yaitu demi tercapainya sebuah kesejahteraan bagi dan untuk masyarakat.

Pada Kelurahan Dadaprejo melaksanakan pemerataan pembangunan untuk memperbaiki daerah tersebut salah satunya mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam strateginya dibagi menjadi dua untuk kesesuaian penerimaan bantuan, yaitu melalui:

a. Formulir

Tahap pertama dalam pendataan adalah pemberian formulir pada masyarakat miskin. Hal ini diberikan untuk mengetahui kriteria miskin dari masyarakat tersebut. Formulir tersebut diisi berdasarkan pada keadaan masyarakat tersebut secara jujur karena dengan begitu akan mempermudah melihat kemiskinan orang tersebut. Setelah pengisian formulir miskin akan dilakukan survei oleh pemerintah Kelurahan Dadaprejo.

b. Survei

Setelah pengisian formulir miskin yang diberikan Kelurahan Dadaprejo pada warga miskin adalah melakukan survei. Survei ini bertujuan untuk mengecek kembali keabsahan dari formulir yang sudah diisi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam survei ini pemerintah Kelurahan Dadaprejo pada bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat turun langsung untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat tersebut yang dibantu oleh Lembaga Pemberdaya Masyarakat Kelurahan (LPMK), kemudian dibantu

oleh karang taruna untuk bekerjasama mengecek antar rumah dan keadaannya kemudian apabila ada kendala ataupun isi yang tidak sesuai dengan formulir maka Kelurahan akan meninjau juga dan dibantu oleh RT/RW untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan keadaan sehari-hari masyarakatnya karena RT/RW merupakan lembaga desa paling rendah dalam mengurus daerahnya sehingga mereka sangat memahami kondisiarganya.

Peran pembangunan di desa ini memiliki tujuan untuk memperbaiki desa baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan. Adanya pemerataan pembangunan tidak serta merta untuk kepentingan pribadi melainkan memberikan fasilitas dan sarana prasarana pada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus takut karena adanya fasilitas ini dipergunakan untuk semua kalangan agar bisa berjalan secara bersama. Sarana dan prasarana ini mempermudah mudah masyarakat terutama yang tidak mampu untuk bertahan dan bisa memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Strategi Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Dadaprejo, maka disimpulkan sebagai berikut:

Dalam kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo dapat dilaksanakan atau diselesaikan berdasarkan pada pemerataan pembangunan dengan model *bottom-up* dimana pembuat kebijakan berdasarkan pada lembaga daerah yaitu Kelurahan dan pemerintah pusat hanya mengikuti saja. Selain itu, untuk kesesuaian penerima bantuan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat mendukung dimana Kelurahan bisa membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri bisa disebut sebagai dekonsentrasi untuk membantu menyelesaikan kemiskinan yang ada sehingga otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipergunakan untuk desa sebagai lembaga terendah untuk membuat sebuah kebijakan untuk mempermudah dan mempercepat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan strategi pemerataan dan otonomi daerah berjalan baik hal tersebut dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Kelurahan Dadaprejo sehingga pada saat ini tingkat kesesuaian penerima bantuan langsung tunai di Kelurahan Dadaprejo sangat baik.

Faktor penghambat dalam Strategi Pemerataan Melalui Kesesuaian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kelurahan Dadaprejo yaitu, minimnya anggaran BLT sehingga masyarakat yang mendapatkan bantuan merasa tidak puas. Selain itu, adanya kecemburuan masyarakat yang mana

sebelumnya mendapatkan bantuan dan kemudian tidak dapat sehingga membuat masyarakat sering mengeluh pada RT/RW ataupun pada pihak Kelurahan secara langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa hal yang disarankan oleh peneliti:

1. Data penerima bantuan langsung tunai pada pemerintah Kota Batu tidak segera diperbarui yang juga bisa menjadi penghambat dalam pemberian bantuan, seharusnya pemerintah Kelurahan Dadaprejo menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota untuk segera memperbarui data penerima bantuan setidaknya satu tahun sekali melalui surat tertulis. Apabila melalui surat tertulis tidak ada tanggapan maka Pemerintah Daerah harus datang langsung ke Pemerintah Kota untuk segera memperbarui data.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan adanya data penerima bantuan yang belum diperbarui oleh pemerintah pusat untuk bantuan langsung tunai yang menghambat jalannya pemberian bantuan. Hal ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mencari satu permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Batu.
3. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan terdapat temuan baru yakni adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pengusaha lokal daerah tersebut. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian di Kelurahan Dadaprejo.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
- Abdulah Yusuf. 2022. Pengertian Kajian Teori
- Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2002. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo. Yogyakarta: Andi.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea

- Kabupaten Minahasa. Jurnal Administrasi Publik, 7.(108)
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi 5. Jakarta:Rineka Cipta .
- Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. (2001). Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. UniversitasGajah Mada.
- Suparmoko, 2002. Ekonomi public untuk keuangan dan pembangunan daerah.

Sumber Jurnal:

- Herdiana, Dian, et al. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan." Jurnal Inspirasi 12.1 (2021): 1-16.
- Hakim, A.R. 2005. Evaluasi Kemandirian Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah Subosukawonosraten Provinsi Jawa Tengah (Tinjauan Keuangan Daerah). Dinamika Jurnal Ekonomi Pembangunan FE-UNS, Vol.1, No.1.
- Hanura Siti. 2015. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Baruta Lestari Kecamatan Sangia Wambulu Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Karuru, P. (2013). Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2(1), 1-9.